

## **BAB V**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Pada Bab V ini peneliti akan menjelaskan analisis terkait hasil penelitian mengenai Implementasi Program Regenerasi Petani: studi kasus Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Seluruh data hasil penelitian ini diperoleh lalu disajikan dari hasil peneliti melakukan wawancara, observasi, dan mendokumentasikannya secara langsung ke lapangan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, para Petani yang mengikuti program Regenerasi Petani, dan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, lalu telah dianalisa sesuai dengan arah kajian penelitian. Kelengkapan wawancara ini juga dilengkapi dengan hasil studi dokumen, bertujuan untuk meningkatkan kualitas data yang dilakukan. Analisis ini diniliasi dan digunakan sesuai dengan tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2023 tentang Regenerasi Petani Jawa Barat untuk Peningkata Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **5.1 Komunikasi**

Menurut George C. Edward III persyaratan pertama untuk implementasi kebijakan agar efektif yaitu pembuat keputusan perlu mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan instruksi tersebut perlu dikomunikasikan kepada

anggota lainnya, dan terlebih kepada personel yang tepat sebelum mengikuti keputusan dan instruksi tersebut. Dalam komunikasi ini juga memiliki 3 indikator penting untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yakni Transisi, Kejelasan, dan Konsisten.

Dalam hal komunikasi ini sendiri sudah adanya sosialisasi kepada masyarakat se-Jawa Barat terkait program besar Regenerasi Petani dari tahun 2021 hingga sekarang 2024. Dalam sosialisasi dan mengkomunikasi untuk berjalan program dan pemberian informasi ini sendiri memang melibatkan banyak instansi, bidang, serta swasta dan sudah tercantum juga pada Keputusan Gubernur Jawa Barat 520/ 05/Kep.219-Rek/2021 tentang Tim Pelaksana Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam perancangan ataupun pelaksanaan program Regenerasi Petani, sudah banyak menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang berperan dalam membantu pelaksanaan program ini dengan menggunakan strategi *Pentahelix*. *Pentahelix* ini adalah salah satu cara dalam mengatasi masalah serta mengembangkan program dengan melibatkan lintas sektor untuk saling berbagi peran secara luas. Komponen yang menyusun strategi *Pentahelix* meliputi:

**Gambar 11. Strategi Pentahelix dalam Pelaksanaan Program Regenerasi Petani**



Sumber: Road Map

### **5.1.1 Transmisi (Penyampaian Pesan)**

Transmisi ini diharapkan agar kebijakan publik yang telah dibuat dapat disampaikan dan diimplementasikan bukan hanya kepada tim teknis kegiatan, melainkan memang harus tersebar secara luas walaupun hanya di satu instansi tertentu, sehingga dari sisi transmisi yakni untuk mengirimkan dan menerima atau jadinya untuk pertukaran informasi jadi jelas, serta penyampai dan penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan, bahkan pelaksanaan program

Regenerasi Petani bisa jelas pada setiap alur birokrasinya dan adanya *feed back*. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan DTPH, dan mewawancarai Ibu RA sebagai Penanggung jawab Program Regenerasi Petani, bahwa:

*“Dari DTPH sendiri sudah adanya terjadwal kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) untuk para Petaninya, setiap tahunnya yaitu satu bulan sekali, dan itu memang semua komoditas disatukan”*.<sup>50</sup>

Selanjutnya Pa GH selaku PIC, dari DTPH menambahkan:

*“Nah jika stakeholder yang ada kaitannya sama kita itu semuanya ada tiga. Pertama ya Petani itu sendiri. Kedua Pemprov Jabar → yakni mencakup Mitra-mitra seperti di Biro Perekonomian, lalu Dinas Industri dan Perdagangan, ya pokoknya dinas-dinas yang ada dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ketiga, yaitu pemangku kepemimpinan terkait dinas lingkup Kabupaten/Kota. Nah selebihnya yaitu Swasta, perguruan tinggi jadi itu stakeholder secara ga langsung.*

*Cuma yang pasti berkaitan yakni 3 itu, karena sudah ada Pergub dan Kepgub terkaitnya, jadi siapa-siapanya saja PIC dan pihak-pihak terkait di situ ada tugas dan wewenangnya”*.<sup>51</sup>

Lalu untuk menjawab terkait transmisi ini, peneliti mewawancarai Biro Perekonomian yang sebagai Koordinator Pelaksana dan Pengendali Program Kegiatan, yang mana sesuai dengan Keputusan Gubernur Jabar. Biro

---

<sup>50</sup> Wawancara dilakukan dengan Ibu RA, Ketua Tim Keteganaan Bidang Penyuluhan sebagai Penanggungjawab Program Regenerasi Petani, pada 4 Juni 2024

<sup>51</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak GH, PIC DTPH dari Tim Penyuluhan Khusus Program Regenerasi Petani, pada 4 Juni 2024

Perekonomian ini sendiri tidaklah mudah untuk menjalankan program yang besar ini, terlebih saat awal mula dicanangkan dan dibuat, lalu diimplementasikan pada saat tahun 2021, yang di mana keadaan tersebut di seluruh bagian Indonesia, termasuk Jawa Barat sedang dilanda Covid-19, akhirnya dari pusat melibatkan Kolaborasi *Pentahelix* seperti yang peneliti sudah sampaikan di atas. Peneliti mewawancarai Bapak OW, sebagai ketua *Team of Team* untuk program ini, lalu beliau menjelaskan secara detail juga untuk menyeluruh, yaitu:

*“Sebetulnya kalau untuk sosialisasi program ini sudah kita lakukan rutin ya. Jadi dari mulai adanya program ini, jadi kita sosialisasikan pertama ke Pelaksana Utama. Nah pelaklasan utama itu kan yang pegang komoditas ya termasuk DTPH, di dalamnya karena pegang komoditas di pertanian.”*<sup>52</sup>

Lalu Ibu VS sebagai anggota TOT (*Team of team*) menambahkan:

*“Sosialisasi ini sendiri kita intens, karena memang program ini program baru ya, jadi program yang berjalan terlebih dahulu baru kemudian kita susun gitu dari sisi kebijakan dan segala macamnya”*<sup>53</sup>

Karena memang ini programnya dibuat, ketika itu masa pandemi Covid-19, lalu **Pak Gubernur melihat memang ada kerentanan di situ**. Supaya nantinya muncul inovasi, terutama di bidang Pertanian. Maka dari itu pertanian

---

<sup>52</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak OW, Ketua Team of Team Program Regenerasi Petanii, pada 20 Mei 2024

ini sendiri dirasa oleh Pak Gubernur **bisa memberikan upaya prospek yang lebih baik, agar hasil bisa kembali lagi kepada masyarakat sekitar.** Karena di masa pandemi, pertanian adalah sektor yang dipandang bisa bertahan. Makanya setelah setelah program ini dijalankan, baru pusat yakni Sekretariat Biro Perekonomian merencanakan kebijakan pelaksanaan dan lain sebagainya. **Sebab** untuk mensosialisasikan kegiatan ini memang perlu *effort* yang cukup **lebih intens** karena memang **perlu digarap betul-betul, karena kegiatan ini dari hulu sampai hilir.**

Lalu Ibu VS mendukung terkait komunikasi yang jelas ini yaitu:

*“Makanya kita liat dari sisi permasalahannya terlebih dahulu, kemudian nanti baru kita step by step yaitu langkah langkah apa yang harus dilakukan. **Kegiatan untuk komunikasinya ini sendiri mulai dari pertemuan, sosialisasi, kemudian rapat rapat koordinasi. Itu termasuk dengan bidang pertanian ya, khusus di tanaman pangan dan hortikultura DTPH**”.*<sup>54</sup>

Perihal untuk mempermudah memberikan alur komunikasi transmisi yang jelas dan menyebar ini juga memang dalam kepengurusan Biro Perekonomian yang berlandaskan. Kepgub sudah membagi pada Sekretariat Koordinator, dengan beranggotakan 17 orang, dan 1 orang sebagai kepalanya, dan 10 anggota di dalamnya adalah Tenaga Ahli untuk sebagai PIC atau penghubung kepada masing-masing dinas terkait dari Biro Perekonomian,

---

<sup>54</sup> *Ibid*

seperti; Pa Fuad PIC Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar, Kang Dias PIC Dinas Perkebunan Jabar, Mas Putra PIC Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, Ka Ajeng PIC Dinas Kehutanan Jabar, Mba Haifa PIC Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, dan Bu Bella PIC Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Mereka ini sebagai Tim Sekretariat/PIC atau LO yang mengatur kegiatan, data-data, kekurangan atau laporan melalui mereka.

Selanjutnya menurut Pa UM selaku Ketua Pelaksana, dari Biro Perekonomian, yaitu:

*“Kegiatan juga ada saat jika Rakor (Rapat Koordinator), jadi saat kegiatan berlangsung seluruh informasi dan sesuatu yang ingin dibicarakan antar dinas bisa langsung disampaikan di situ”.*<sup>55</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara terkait komunikasi, secara garis besar dengan para implementor memanglah sudah jelas dan memang sebagai Pengendali Program Kegiatan telah memberikan *effort* serta mengerahkan segala hal yang baik agar setiap saatnya nanti dapat membuahkan hal yang baik untuk secara teknis, ataupun terhadap para petani ini sendiri, bahkan masyarakat.

Tetapi saat mewawancarai para petani pada naungan DTPH yang berlokasinya di Balai Benih Hortikultura (BBH), Jatinangor, Kabupaten

---

<sup>55</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak UM, Koordinator Sekretariat; Kepala Pengampu Program Regenerasi Petani, pada 20 Mei 2024

Sumedang, Jawa Barat. Petani diwawancarai oleh peneliti secara *Focus Group Discussion* (FGD), jadinya para petani bebas saling berpendapat, maupun menanggapi para rekannya, dan menjawab secara bersamaan.

Setelah mewawancarai Mas AA, Mas RO, Mas AR, Mas AO, Mas R, dan Teh QI melihat dari penyampaian informasi perekrutan, yaitu:

*“Jika pada angkatan pertama itu jelas dan memang tersebar dari berbagai platform, apa lagi di posting oleh Pa Gubernurnya sendiri. Tapi setelah berjalannya program untuk saling berkomunikasi ini antar mitra dan pihak adanya penyampaian informasi yang kaya nanggung gitu teh, dan malah untuk angkatan-angkatan selanjutnya (2022 – 2023) mereka malah nanya ke kami-kami untuk perekrutan kapan dibuka lagi, trus setelah udah bisa masuk ke Dashboard Regenerasi Petani, selanjutnya harus ngapain, dan apakah mereka ini sudah menjadi bagian dalam program”<sup>56</sup>*

Lalu peneliti menanyakan apakah pemerintah seperti DTPH maupun dari Biro Perekonomian sendiri memberitahu informasi terkait regulasi dan peraturan apa saja yang mendasari dari berjalannya program ini, ataupun roadmap bagaimana alur berjalannya alur birokrasi, serta pembagian dari klasifikasi bagi setiap masing-masing petaninya, lalu dijawab oleh Mas AA, serta ditambahkan dengan argument rekan-rekannya, bahwa:

---

<sup>56</sup> Wawancara dilakukan dengan petani yaitu Mas AA, Mas RO, Mas AR, Mas AO, Mas R, Teh QI Petani Utama, pada 28 Mei 2024



*“Dari pusat ataupun PemProv mah kurang ada informasi terkait itu teh, kaya dari pas itu teteh nnaya ke saya ini masuk dalam klasifikasi apa, nah kami kurang di kasih tau, lalu tentang RoadMap berjalannya program kurang adanya informasi lanjutan dan seperti hanya dibiarkan saja kaminya”<sup>57</sup>*

Jadinya memang untuk informasi pembukaan pendaftaran pada program Regenerasi Petani ini sudah tersebar dan diketahui banyak masyarakat, hanya saja mereka masih kebingungan bahkan tidak tahu harus menghubungi siapa agar bisa mendapatkan informasi tahapan selanjutnya sebagai petani. Sebab adanya perbedaan proses pertukarannya informasi pada generasi pertama yaitu 2021, dengan yang 2022 dan 2023. Tahun 2021 para petani dikumpulkan pada satu tempat lalu sudah dipisah-pisahkan siapa yang dalam komoditas tertentu, dan langsung di arahkan adanya Bimtek pada jadwal yang sudah ditentukan, serta pertukaran informasi ini langsung pada Dinas Pemprovnya masing-masing, tapi pada angkatan 2022 dan 2023 mereka mendaftar atas dasar direkomendasikan oleh Dinas Pemda Kabupaten/Kota setempat atau memang mendaftar mandiri, dan alur pertukaran informasi terdekatnya pada tahun 2022 dan 2023 yaitu dengan Dinas Pemda Kabupate/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara tentang komunikasi transmisi ini yakni proses perencanaan, penyebaran maupun pertukaran informasi pelaksanaan

---

<sup>57</sup> *Ibid*

kegiatan ataupun pelaksanaan program di lapangan sudah jelas dan dilakukan oleh para implementor dan pelaksana utamanya, tetapi memang akhirnya pada saat sampai kepada para petani, kurang adanya kesesuaian informasi serta adanya alur yang bias untuk para petani.

Walaupun sesama mitra implementor sudah adanya kesesamaan cara untuk menginformasikannya, tetapi karena memang para petani lah disini yang merupakan sasaran dan target para implementor, dan mereka merasakan dampak kurang baik dari penyampaian dan penyebaran informasi untuk melakukan kegiatan yang telah dicanangkan. Maka dalam hal ini tidak sesuai dengan Teori George C. Edward III dalam transmisi untuk komunikasi.

### **5.1.2 Kejelasan**

Kejelasan ini dapat mengkomunikasikan informasi. Menghindari kurangnya kejelasan informasi agar tidak ada pihak yang salah menafsirkan makna yang berbeda dalam mendapatkan/menyampaikan suatu komunikasi, bahkan jangan salah saat penerapannya. Setelah mewawancarai dengan DTPH dan berbincang dengan Pa GH selaku PIC dari Tim Penyuluhan Khusus Program Regenerasi Petani, beliau menjelaskan:

*“Pertama ada namanya system Terpadu, ini merupakan wadah yang diberikan pada Dashboard Regenerasi Petani, karena fungsinya*

*dashboard itu sendiri menerapkan prinsip kejelasan dan keterbukaan, system ini memang langsung dipegang oleh pusat yaitu Birek”<sup>58</sup>*

Selanjutnya beliau menambahkan:

*“Cara yang kedua untuk kejelasan informasi yaitu memanfaatkan media sosial yaitu Instagram @regenerasipetani dan ini juga dikelola langsung oleh Sekretariat Regenerasi Petani dari pusat”<sup>59</sup>*

Jika kejelasan informasi yang diberikan oleh DTPH ini sendiri tidak adanya *system* khusus seperti sosial media khusus Regenerasi Petani, karena ini dinas yang mengelola banyak program yang sebagian kecil di antaranya Regenerasi Petani. Perihal ada urgensi tertentu yang memang mendesak pasti dari DTPH *updating* info tersebut dari sosial media juga, tetapi Sosmed DTPH tidak secara khusus tentang Regpet.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada para petani tentang kejelasan komunikasi, bahwa mereka merasa memang ada yang jelas dan yang tidak, masih ada keterkaitannya dengan penjelasan Transmisi di atas, yaitu malah semakin tidak jelasnya penyampaian komunikasi informasi, untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Pernyataan tersebut divalidasi oleh Petani Mas RO, petani Tanaman Hias naungan DTPH

---

<sup>58</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak GH, PIC DTPH dari Tim Penyuluhan Khusus Program Regenerasi Petani, pada 4 Juni 2024

<sup>59</sup> *Ibid*

*“Dari DTPH teh cuma kasih tau kalo kita ada nih kontrak 2 tahun dengan Bank BJB, nah 1 tahun pertama dikasih pinjem modal sama BJB, lalu kenapa 2 tahun, karena di tahun pertama itu kita untuk balikin modal juga, lalu tahun kedua untuk ke kaminya dapet hasil, jadi ini untuk cashflow bisnisnya aja”<sup>60</sup>*

Tapi pada 6 bulan awal petani merasa ada masalah dari dinas yaitu tiba-tiba dibiarkan atau dilepas, jadinya terancam tidak lunas para hutang petani ke BJB ini, lalu para petani ini menagih kepada dinas Pemprov tapi sulit karena sedang adanya rotasi jabatan dari dinas sendiri, yang dulu awalnya dipegang oleh Tim Hortikultura, lalu dialihkan kepada Tim Penyuluhan yang mereka sendiri masih kurang paham bagaimana dari awlanya yang terjadi di naungan yang BBH Jatinangor.

Bu VS, Kepala Sub. Bagian Analisis, Anggota Team of Team dari Biro Perekonomian, menjelaskan juga bahwa:

*“Kejelasan komunikasi yang biasanya sudah terjalin yaitu memang sesuai alur aja, yakni Petani – DTPH – Biro Perekonomian”<sup>61</sup>*

Jadi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, kejelasan yang dirasakan oleh para petani ini masih kurang juga, sebab banyaknya ketidakjelasan antar pihak baik *offtaker*, *avalis*, dan pemerintah, alhasil sering

---

<sup>60</sup> Wawancara dilakukan dengan petani yaitu Mas RO , Petani Madya, pada 28 Mei 2024

<sup>61</sup> Wawancara dilakukan dengan Ibu VS, Kepala Sub. Bagian Analisis; Anggota Team of Team, pada 20 Mei 2024

bias dan rancu untuk menelaah komunikasi sesuatu sekarang mereka pun dilepas saja oleh penyuluhnya padahal pembinaan dan kegiatan Bimtek ini kurang memberikan dampak yang lebih, jadinya kejelasan mulai dari pendaftaran, informasi, kegiatan yang harus diemban, dan syarat ketentuan yang berlaku juga suka tidak jelas. Didukung juga dari pihak Birek yang menyebutkan bahwa seringnya pusat langsung menyarankan ke penyuluh terdekatnya, karena memang kembali lagi pada alur birokrasinya, tetapi, ketika keadaan sudah urgent, tetap saja agar sesuatunya jelas, pusat menyarankan ke mitra/penyuluh terdekatnya saja.

### **5.1.3 Konsistensi**

Indikator konsistensi yang terakhir dari tahapan komunikasi ini, implementor harus bisa memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan yaitu petani agar hasilnya bisa lebih cepat dan efektif. Maka memang yang diharapkan dari para petani ini sendiri inginnya mereka mendapatkan arahan yang konsisten dan tidak berubah-ubah, karena kurang lebih dari indikator-indikator sebelumnya telah menjelaskan memang masih kurangnya konsisten dari arahan, komunikasi, serta kegiatan yang dilakukan dari pusat.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai konsistensi komunikasi informasi yang disampaikan oleh GH dar DTPH, menjelaskan bahwa:

*“Pada tahun awal memang pengampu petani langsung adalah dinas Pemprov terkait, tetapi pada tahun selanjutnya terdapat perubahan, ya karena memang kami mengikuti dari atas”<sup>62</sup>*

Ketidak konsistenan inilah yang membuat para petani sulit untuk bisa mengembangkan kelompoknya dalam Komoditas Tanaman Hias, dan berpengaruh untuk membentuk pengembangan sumberdaya manusia dari masing-masing mereka, jadinya menghasilkan kurang lancarnya kegiatan-kegiatan yang sedang dijalani.

Secara detail pelaksanaan dilapangan, maka peneliti datang langsung juga, sembari mewawancarai anggota petani-petani sebagai berikut:

*“Setelah kontrak yang 2 tahun dengan Bank BJB, pada setahun pertama udah nih, tapi kami langsung diarahin ke bawang merah katanya coba olah lagi setelah beres dari yang tanaman hias, nah ini diarahin sama Bank Indonesia buat dapetin CSR bawang merah ini”<sup>63</sup>*

Selanjutnya Pa UM dari Biro Perekonomian menambahkan:

*“Pas itu juga pernah ada petani dari Sumedang, katanya minta untuk mendapatkan sertifikasi organic, lalu saya coba hubungi dulu ke DTPH bagian Kabupate/Kota, karena biasanya ada kegiatan fasilitasi*

---

<sup>62</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak GH, PIC DTPH dari Tim Penyuluhan Khusus Program Regenerasi Petani, pada 4 Juni 2024

<sup>63</sup> Wawancara dilakukan dengan petani yaitu Mas AA, Mas RO, Mas AR, Mas AO Petani Utama, pada 28 Mei 2024

*perizinan organic, dari bantuan APBN baik dari Kabupaten/Kota maupun Provinsi”<sup>64</sup>*

Bahwa dapat peneliti simpulkan dari hasil wawancara, perihal kekonsistenan komunikasi tidak sesuai dengan Teori Edward III, memang kurang terciptanya alur yang konsisten, sehingga jika keadaanya seperti ini, terhambatnya tujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia pemberdayaan yang baik bagi para petaninya, karena argument menurut pusat sendiri, terbilang membingungkan untuk petaninya, sebab seperti dilempar-lempar saat koordinasi meminta legalitas, lalu menurut petani diatas mereka jadinya tidak menentu juga harus fokus pada komoditas mananya.

## **5.2 Sumber Daya**

Pada sumber daya ini perspektif yang harus dilihat ialah dari latar belakang sang implementor, anggota dan pegawai terkait, serta dari mana kelas atau jabatannya, di dukung dengan sumber daya non-manusia lainnya.

### **5.2.1 Sumber Daya Manusia**

Pada sumber daya manusia di sini peneliti melihat bagaimana sumber daya sang implementor untuk menggarap dan melaksanakan program ini, baik

---

<sup>64</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak UM, Koordinator Sekretariat; Kepala Pengampu Program Regenerasi Petani, pada 20 Mei 2024

yang teknis saja ataupun di lapangan, serta menilai dari para *stakeholder* menilai sumber daya petani dalam naungan DTPH.

Pada DTPH ini sendiri setelah peneliti mewawancarai Pa GH sebagai PIC, beliau menjawab :

*“Jika SDM pada DTPH dan terkhususnya yang mengelola program, yaitu dalam Tim Penyuluhan sudah cukup, dan apabila melihat jumlah gabungan anggota petani pada naungan DTPH ini malah kebanyakan”*.<sup>65</sup>

Hal ini terjadi karena memang adanya prosedur perekrutan yang berbeda dari pemerintah untuk dari tahun 2022 hingga selanjutnya. Jika ditahun pertama para petani diinformasikan untuk berkumpul dan lalu di situ petani masih terpantau, sekaligus untuk melihat klasifikasi mana saja, lain hal pada tahun 2022 dan selanjutnya, yaitu penyuluh dari Dinas Pemda Kabupaten/Kota itu ikut menyeleksi dan merekomendasikan siapa-siapanya, hingga nanti DTPH langsung mendapatkan data pendaftar yang banyak.

Jawaban dari Pa GH ini didukung oleh para petani naungan DTPH khusus pada Tanaman Hias, bahwa mereka menjelaskan :

---

<sup>65</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak GH, PIC DTPH dari Tim Penyuluhan Khusus Program Regenerasi Petani, pada 4 Juni 2024



*“Pada komoditas kami mah sudah cukup anggota petaninya, walaupun dari awal yang 28 orang berkurang menjadi 9”.*<sup>66</sup>

Para petani yang dulunya Tanaman Hias, sudah tidak memegang komoditas tersebut. Sudah berganti pada tahun 2022 yang dari bawang merah, lalu bawang merah sudah tidak ada lagi, lalu sekarang mereka memegang serta membudidayakan buah Melon jenis TajMahal dan Inthanon, selain itu ada juga selada, yang memang aktif dikelola oleh 5 orang hingga sekarang. Bila untuk dari segi kemampuan dan keterampilan dari DTPH, dan Biro Perekonomian memang harus adanya dasar dari kejuruan yang serupa dan berkorelasi dengan apa yang dipegang, seperti yang dijelaskan oleh Bu VS selaku anggota *Team of Teams* :

*“Jika di Biro sendiri memang sudah cukup orang untuk mengelola program ini, tetapi ada beberapa bagian seperti admin Dashboard, dan LO yang memang kami rekrut sendiri (bukan ASN), jadi mereka disebut Tenaga Ahli”.*<sup>67</sup>

Informasi ini memang serupa dan sudah ada pembahasan pada bab sebelumnya, yang melingkupi informasi ini yaitu bersifat formal yang tertulis seperti instruksi maupun informasi data dalam mengimplementasikan suatu

---

<sup>66</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak GH, PIC DTPH dari Tim Penyuluhan Khusus Program Regenerasi Petani, pada 4 Juni 2024

<sup>67</sup> Wawancara dilakukan dengan Ibu VS, Kepala Sub. Bagian Analisis; Anggota Team of Team, pada 20 Mei 2024

kebijakan, tetapi ini didukung dengan kolaborasi dari sumber daya yang baik, peraturan, dan pedoman pelaksanaannya.

### 5.2.2 Fasilitas

Fasilitas ini sendiri yang dirasakan oleh para petani sudah lumayan membantu dari sarana dan prasarana seperti tempat mereka masih diberikan pinjaman tempat yaitu di BBH Jatinangor, lalu yang memang dipinjamkan oleh BBH, seperti alat siram otomatis (iaoti), semprotan manual, dan rak yang memang sudah ada dari saat memegang Komoditas Tanaman Hias, seperti yang dijelaskan oleh Mas AO, yakni :

*“Untuk mendukung kemandirian kami memang hanya dipinjamkan saja beberapa alat tersebut, dan itu pun sudah cukup”.*<sup>68</sup>

Pada DTPH juga memang serupa dengan jawaban dari para petani, serta Pa GH menambahkan pernyataannya saat wawancara :

*“Kami juga memfasilitasi setiap unit yang membutuhkan seperti bibit dll, ini kegiatannya saat tahun lalu pada kegiatan training off farmer, sekarang juga dari dinas menyewakan tempat/lahan BMD (Barang Milik Daerah) kepada petani yang BBH Jatinangor”.*<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dilakukan dengan petani yaitu Mas AO , Petani Pemula, pada 28 Mei 2024

<sup>69</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak GH, PIC DTPH dari Tim Penyuluhan Khusus Program Regenerasi Petani, pada 4 Juni 2024

### 5.3 Disposisi/Sikap

Disposisi ini ialah sikap pelaksana dari implementor atau para pelaksana kebijakannya. Sebab ini faktor yang dilihat jika beliau bersikap baik terhadap suatu kebijakan serta adanya dukungan dari diri orang tersebut.

Pengangkatan, pemilihan, atau perekrutan anggota sebagai pelaksana kebijakan ini memang harus dari orang-orang yang tepat, maka dari itu dilihat dari dedikasi, wawasan yang dimiliki, dan bisa dilihat dari pengalaman apa yang diembannya, karena itu bisa berpengaruh pada pengabdian yang akan implementor kerjakan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Seperti hasil wawancara dengan Ibu RA, dari DTPH, beliau membicarakan terkait mental seorang pelayan publik, yaitu:

*Kalau jaman sekarang kalau menurut saya, kita sebagai pelayan masyarakat itu harus punya mental yang kuat dan siap untuk beraksi. Tapi berangsur ini bergeser karena yang saya lihat sendiri inikan usianya sudah sangat tua. Nah maka dari itu mental teman teman. Melayani. Disinipun memang harus menyesuaikan dengan kebiasaan yang beralih itu. Jadi kekakuan itu yang akhirnya kita mulai.*

Karena para pelayan publik ini menangani generasi milenial yang di mana mereka lebih muda dari pada pegawai dari penyuluhan, akhirnya memang sikap, atau pribadi dari pelayan publik ini sangat berpengaruh, karena yang memang sedang ditangani ialah generasi yang sudah mengerti ke-modernan, akhirnya

pelayan publik yang suda tua, harus adanya kemaun untuk belajar teknologi yang maju, dan para pegawai yang memang menangani program ini hanya untuk memberikan kemaun, motivasi agar mereka selalu bertekun dalam dunia pertanian, dan untuk peningkatan kemampuan, solidaritas.

Pada Birek sendiri saat peneliti mewawancarai Pa UM, beliau membahas terkait pengakatan pegawai memang karen sudah adanya kriteria, dan bisa dari promosi, selengkapnya yaitu:

*“Dulu saya itu di DTPH sebagai Kabid, tetapi karena saya sudah lama pada jabatan dan bidang itu, saya mendapatkan promosi dan ditunjuk langsung oleh Kabid Birek unntuk sebagai Ketua Koodinator pelaksana dari program Regenerasi Petani ini.*

Seperti yang sudah disampaikan menandakan bahwa memang lah pengalaman, kejuruan yang memang berkorelasi dengan kehidupan pribadinya, jika bisa bermanfaat untuk program akan ditunjuk, seperti di Birek ini sendiri, dibentuk lagi para pekerja ahli yang memang direkrut (di luar dari PNS), mereka berusaha dari yang sudah minimal S1 dan berhubungan dengan pertania, agroteknologi, pertanian dan lain-lain. Akhirnya jika tidak hal ini sesuai dengan fokus mereka saat studi bisa berdampak baik juga pada *struktur birokrasi* yang semakin jelas, sehingga untuk penyebaran peran dan tanggung jawanya bisa jelas dan

menghailkan *alur komunikasi* yang jelas juga dalam melakukan pekerjaan mereka-masing

#### **5.4 Struktur Birokrasi**

Adanya struktur birokrasi ini pada segala instansi atau mitra, tidak terkhusus pada struktur pemerintah, melainkan pada organisasi-organisasi swasta, dan Lembaga yang ada seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, yang di mana memang harus mengikuti prosedur dasar dalam menjalankan kewajiban dan tugas pada masing-masing individu ataupun bidang yang ada.

Kegunaan adanya SOP ini dapat membantu proses pelaksanaan secara optimal agar waktu dan pelaksanaannya bisa berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pelaksanaan program, ataupun perindividu maupun pejabatnya dalam organisasi agar bisa tersebar luas, hingga menciptakan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan atau peraturannya.

Pada struktur birokrasi ini di dalamnya ialah penyebaran peran dan tanggung jawab dalam kebijakan Regenerasi Petani kepada beberapa instansi dan mitra lainnya sehingga diperlukannya koordinasi. Karena memang jika semakin banyak kekuasaan atau alur yang terlibat akan semakin kecil pula kemungkinan suatu program akan berhasil, terlebih program Regenerasi Petani ini memanglah

program besar yakni cakupannya se-Jawa Barat yang di mana memang banyak mitra, instansi yang terlibat, hal ini faktor yang membuat koordinasi semakin sulit.

Program Regenerasi Petani ini memang sudah banyak landasan regulasinya, seperti yang sudah-sudah peneliti *mention*, baik siapa saja pihak atau dinas dalam Tim Fasilitasi yang tercantum dalam Kepgub Jabar No. 520, yakni ada Susunan Personalia dalam 8 Tim, yaitu ; 1) Pengarah, 2) Pembina, 3) Pengendali Program Kegiatan, 4) Pelaksana Utama, 5) Pelaksana Pendukung, 6) Pelaksana Penunjang, 7) Pelaksana Program, dan 8) Sekretariat Koordinator. Bisa dilihat bahwa memang penyebaran tim ini sendiri memang sangat banyak.

Pernyataan di atas diperkuat oleh keterangan hasil wawancara kepada Biro Perekonomian yakni Pa Oki dan Bu Vinda, selaku ketua dan anggota dalam tim, mengatakan :

*“karena dari kita sendiri sudah dibentuk Tim Pelaksana yang sudah diputuskan oleh Keputusan Gubernur. Jika terkait untuk PIC yang memang menangani di bidang-bidang tertentu, itu juga tercantum dalam Tim Pelaksana, nah kalo untuk Pelaksana Utama tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah terbagi jelas dalam Kepgub ini, dan malah kan di dalam Kepgub yang mencantumkan Tim Pelaksana sudah jelas kewenangannya, Tupoksinya seperti apa”.*<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dilakukan dengan Bapak OW, Ketua Team of Team Program Regenerasi Petanii, pada 20 Mei 2024

Selanjutnya di tambahkan oleh Bu Vinda, yaitu :

*“selama ini kami tidak pernah wewenangnya melebihi dari apa yang sudah ditetapkan, jadi kami berdasarkan koridor yang sudah dijelaskan dalam Kepgub tersebut”<sup>71</sup>*

Karena pada Biro ini sendiri memang dibentuk *Team of Team* untuk semakin khusus mengelola program Regenerasi Petani, karena jika melihat pada Kepgub bagian Tim Sekretariat Koordinator, tertera 18 orang, yang satu diantaranya adalah Pa Umad sebagai ketua dari Tim ini, lalu dari Tim ini sendiri dibentuk dengan nama *Team of Team*, lalu nama anggota dari nomor satu hingga tujuh adalah personel dalam Biro Perekonomian, selanjutnya nomor delapan hingga tujuh belas merupakan Tim Sekretariat/*Team of Team* (Tenaga Ahli/Bukan PNS), Tenaga Ahli ini sendiri yang memang dinas teknis terkait yaitu sebagai PIC, dan ada juga yang mendukung dalam pengelolaan system informasi; jadi tenaga ahli untuk mengelola *dashboard @petanimilenial*.

Pernyataan dari Biro Perekonomian di atas dirasa oleh peneliti tidak sejalan atau kurang cocok dengan pernyataan dari DTPH, terkait sudah baiknya dari *system* penyebaran tanggung jawab ini, karena dijawab oleh Bu RA, seperti berikut :

---

<sup>71</sup> Wawancara dilakukan dengan Ibu VS, Kepala Sub. Bagian Analisis; Anggota Team of Team, pada 20 Mei 2024

*“kurang ideal untuk penyebaran tanggung jawabnya. Seharusnya seluruh bagian dalam DTPH ini menjadi Stakeholder pendukung. Karena kami dari Bidang Penyuluhan ini hanya untuk meningkatkan SDM, pendampingan dll. Cuman karena penganggarannya ini sedikit, dan jika anggaran disalurkan padahal penyebaran tanggung jawabnya banyak, ya tetap saja tidak akan jadi apa-apa.*

Maka dari itu hingga sampai sekarang masih disentralisir di Bidang Penyuluhan untuk penanggung jawab program secara keseluruhan. Walaupun ada tim khususnya tetapi dalam gabungan Tim Fasilitasi pada Kegub, tetapi dari dinas ini sendiri tidak ada tim khususnya yang terkadang membuat kualahan.

Seperti pernyataan dari para petani hasil wawancara yang peneliti lakukan, yaitu menurut mereka :

*“dari pertanyaan teteh yang udah-udah memang pasti kelihatan akhirnya hasil dari ini asa kualahan dan kurang jelas”*

Bisa peneliti lihat bahwa memang jika fragmentsai yakni penyebaran tanggung jawab ini sebenarnya sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku tetapi pada efek pada kelompok pemanfaat ini masih kurang terasa memberikan dampak yang bagus. Hal ini berimbas pada aspek komunikasi yang mempengaruhi kejelasan di dalamnya, serta mempengaruhi terhadap sumber daya yang ada, karena seharusnya jika informasi dan staf pada DTPH ataupun



Birek yang sudah cukup serta memadai, akan memberikan efek yang signifikan kepada para petani ini, tetapi nyata mereka merasakan kurang, padahal untuk bagian disposisi sudah sesuai dengan kriteria dan penyerapan dari masing-masing instansi.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN & SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada Bab V, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kegagalan Implementasi program Regenerasi Petani di Kabupaten Sumedang. Dipengaruhi tiga faktor dari empat faktor yang dikemukakan Edwards. Pertama Komunikasi, kedua Sumber Daya dan ketiga Disposisi. Lalu variabel Struktur Birokrasi ini tidak ada masalah atau tidak menghambat implementasi program. Deskripsi pengaruh masing-masing dimensi terhadap implementasi program Regenerasi Petani adalah sebagai berikut :

##### **1. Komunikasi**

Kurangnya komunikasi menyebabkan kegagalan dalam implementasi program. Sering terjadi komunikasi yang tidak konsisten antara DTPH ke petani dan dari Biro Perekonomian ke petani. Hal ini membuat petani bingung dan merasakan informasi yang simpang siur. Proses konfirmasi dari petani ke DTPH dan Biro Perekonomianpun lambat direspon atau kurang responsif, yang akhirnya membuat petani ini bingung untuk menjalankan programnya.

## 2. Sumber Daya

Faktor sumber daya merupakan penghambatan dalam keberhasilan implementasi program. DTPH adalah dinas yang menangani petani paling banyak dalam program ini disbanding dinas yang lain. Namun hal ini tidak disertai dengan alokasi dana yang lebih besar karena dana program yang ada akan dibagi sama rata di antara empat dinas pelaksana lainnya. Akibatnya alokasi untuk para petani kecil dan tidak mencukupi untuk proses produksi pertanian. Akhirnya petani harus meminjam dana dari *avalis* dan terjebak hutang karena tidak bisa mengembalikan secara lancar.

## 3. Disposisi

Disposisi juga merupakan penghambat bagi keberhasilan program, ditandai dengan rendahnya sikap dan komitmen para pelaksana untuk melaksanakan program, terutama birokrasi ditingkat bawah. Tidak responsif terhadap keluhan dan kurang transparan dalam informasi. Disamping petugas, petani juga bermasalah dengan pihak *offtaker* dan pihak Bank BJB.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pada dimensi Struktur Birokrasi, tidak mengalami permasalahan. *Standard Operating Procedure (SOP)* sudah dengan jelas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2023 tentang Regenerasi Petani Jawa Barat untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, lalu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 520/ 05/Kep.219-Rek/2021 tentang Tim Pelaksana Program Petani Milenial di Daerah Provinsi Jawa Barat, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 520.05/Kep.29-Rek/2024 tentang Tim Fasilitas Regenerasi Petani, dan Road Map program Regenerasi Petani Provinsi Jawa Barat tahun 2021 – 2027. Dengan demikian pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program Regenerasi Petani di DTPH sangat jelas. Peraturan mengenai sumber daya alokasi dana, penggunaan peralatan dan penempatan tenaga kerja juga jelas tertulis.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- 1) Guna menghasilkan alur komunikasi yang baik, jelas, dan konsisten, kepada setiap komoditas binaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menghadirkan pegawai teknis khusus sebagai (*Person in Charge*) PIC atau penanggung jawab. Seperti halnya konsultan bisnis yang memang *menghandle* ranah bisnisnya saja untuk pemasaran, dan kerjasama dengan mitra, *offtaker*, dan avalis, tetapi hadirnya konsultan ini untuk sementara saja, bukan akhirnya nanti petani menjadi ketergantungan.
- 2) Menyediakan pelatihan dan bimbingan teknis yang memang rutin untuk para petani tentang bagaimana praktik pertanian modern dan penggunaan teknologi pertanian. Segala mitra dan instansi harus mampu mengakses dan mengelola dana yang tersedia untuk mendukung kegiatan ini.
- 3) Merekrut tenaga ahli untuk sebagai (*Person in Charge*) PIC dari masing-masing komoditas, yang nantinya bisa lebih jelas berkomunikasi dengan para PIC dari DTPH maupun Biro Perekonomian, karena dari yang sudah peneliti lihat, kurangnya orang untuk sebagai penyambung informasi yang bisa cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adler, Patricia A., & Adler, Peter, *Membership Roles in Field Research*, Newbury Park, CA: Sage Publication, 1987.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Depok: Rajawalo Pers, 2019.
- Alwasilah, Chaedar. 2008. *Prinsip Pokoknya Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III. C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Indrawanis E., Heriansyah P., 2023, *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Bogor, Lindad Bestari.
- Mustaqim, 2001, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. 2022. *Road Map Program Petani Milenial Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 – 2027*.

- Purwanto, E. A dkk (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ripley, 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*. ChicagoIllionis: Dorsey Press
- S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalitik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito,1999), hlm.127
- Soegiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Subino Hadi Subroto, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif* (Bandung: IKIP, 1999) hlm.17.
- Suprijono, Agus. 2010. *Cooperative Learning*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Husaini, 2006. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

## **JURNAL**

- Azwar, S 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Sigma Alfa.
- Penyusun, Tim. 2021. “Road Map Program Regenerasi Petani Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 - 2027.”
- Setyawan D., Priantono A., Firdaus F. 2021. Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*. Vol. 3, (2)

Suyanto, Herman, Asep. 2009. "Step by Step Web Design : Theory and Practices." Bsi.ac.id. 2009. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/200901/step-by-step-web-design-theory-and-practices>.

## **REGULASI**

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 520.05/Kep.29-Rek/2024 Tentang Tim Fasilitas Regenerasi Petani

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Regenerasi Petani Jawa Barat untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 – 2026

## **INTERNET**

"Badan Pusat Statistik." 2020. Bps.go.id. 2020. <https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

Soegiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

*Portal Jabarprov - Satu Portal untuk Semua Hal Tentang Jawa Barat*. (2023). Jabarprov.go.id. <https://jabarprov.go.id/berita/5-tahun-jabar-juara-program-petani-milenial-solusi-pertanian-berkelanjutan-10035>

*SDG Goal 2: Zero Hunger - UNICEF DATA*. (2023, September 19). UNICEF DATA. <https://data.unicef.org/sdgs/goal-2-zero-hunger/>



- Kembangkan Usaha Petani Milenial Dibantu KURDa Bank Sumedang - Kabupaten Sumedang.* (2023). Sumedangkab.go.id.  
<https://sumedangkab.go.id/berita/detail/kembangkan-usaha-petani-milenial-dibantu-kurda-bank-sumedang>
- Dea Andriyawan, & Ajjiah. (2023, May 24). *Bak Kawah Candradimuka, Program Petani Milenial Gembleng Qhisty Jadi Petani Tangguh.* Bisnis.com; Bisnis.com. <https://bandung.bisnis.com/read/20230524/550/1659034/bak-kawah-candradimuka-program-petani-milenial-gembleng-qhisty-jadi-petani-tangguh>
- medcom.id developer. (2022, December 27). *Begini Curhatan Petani Sumedang saat Bertemu Presiden Jokowi.* Medcom.id; Medcom.id.  
<https://www.medcom.id/foto/ekonomi/Wb7ao9dK-begini-curhatan-petani-sumedang-saat-bertemu-presiden-jokowi>